



RENJA

RENCANA KERJA
TAHUN 2018

**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
Kata Pengantar	i
<u>Daftar Isi</u>	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP.....	II-7
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....	II-13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bapedalitbang	III-4
3.1 Program Dan Kegiatan	III-6
BAB IV PENUTUP	IV-1



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jenderal Sudirman, Painan Telp. (0756) 7464131, Fax. (0756) 7464085

**PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA
BARAT**

NOMOR: TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGANKA BUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Bapedalitbang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Bapedalitbang Adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 2005-2025 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

- (1) Sistematika Penyajian Rencana Kerja Bapedalitbang Tahun 2018, meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapedalitbang Tahun 2016;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - d. BAB IV : Penutup
- (2) Rencana Kerja Bapedalitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Bapedalitbang ini.

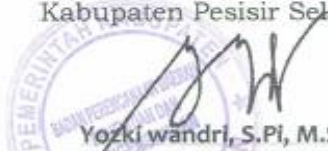



Pasal 3

Peraturan Kepala Bapedalitbang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Februari 2017.

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan


Yozki wandri, S.Pi, M.Si
NIP.197501012000031003

A circular official stamp of Kabupaten Pesisir Selatan, featuring the text "PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN" around the perimeter and a central emblem.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah rencana kerja tahunan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bapedalitbang Tahun 2016-2021. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bapedalitbang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah I-1 tap berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, dalam melayani kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Bapedalitbang dituntut untuk mampu membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Renja-OPD Tahun 2018 ini merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Tahun 2016 merupakan rencana tahunan yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar terwujud sinergisitas antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2018 dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapedalitbang tahun 2018. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Bapedalitbang Tahun 2016, meliputi :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

Bab III Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPEDALITBANG TAHUN 2016



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Hasi evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian target Renstra SKPD s/d tahun sebelumnya (tahun 2016) dapat dilihat pada tabel II.1 berikut:



Tabel. II.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian pada tahun akhir Renstra 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2017 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2017 (tahun berjalan /n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100%	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)*100	12
I	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase dokumen Tata Ruang yang ditindaklanjuti	50%	25%	30%	30%	100	35%	35%	70	
1	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya evaluasi RTRW	100%	0	1	1	100	1	1	100	
2	Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010 – 2030	tersusunnya revisi dokumen RTRW	100%	0	1	1	100	1	1	100	
3	Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Terkoordinasiiknnya pengendalian pemanfaatan ruang	100%	100%				100%	100%	100	
II	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	100	
1	Penyusunan Rancangan RKPD	tersusunnya dokumen RKPD	100%	1	1	1	100	1	1	100	
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	terlaksananya musrenbang RKPD	100%	1	1	1	100	1	1	100	
3	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2020	Tersusunnya RPJMD kab Pessel 2016-2021	100%	0	1	1	100	1	1	100	
4	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	terkelolanya e-planning	100%	0	1	1	100	1	1	100	
5	Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Renstra SKPD	tersusunnya renstra SKPD	100%	0	1	1	100	1	1	100	
6	Penyusunan Kajian KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RPJMD	100%	0	1	1	100	1	1	100	
7	Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Renstra Bappeda 2016-2021	100%	0	1	1	100	1	1	100	
8	Sosialisasi RPJMD	tersosialisasikannya RPJMD Kab. Pessel	100%	0	1	1	100	1	1	100	
9	Penyusunan Kajian KLHS Revisi RTRW	tersedianya dokumen KLHS RTRW	100%	0	1	1	100	1	1	100	
III	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100	
1	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS RAPBD	200%	2	2	2	100	2	2	100	
2	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	200%	2	2	2	100	2	2	100	
IV	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	

**RENJA BAPEDALITBANG
TAHUN 2018**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian pada tahun akhir Renstra 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2017 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2017 (tahun berjalan /n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100	12
2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
3	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaaan	terkoordinasikanya rencana percepatan pembangunan kawasan perdesaaan	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
4	Penyusunan Kajian Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Pangan	tersedianya kajian tentang pengembangan pangan daerah	100%	0	1	1	100	1	1	100	
5	Penyusunan Ranperda Pengembangan BUMD Kabupaten Pesisir Selatan	tersusunya perda BUMD kepariwisataan	100%	0%	1	1	100	1	1	100	
6	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	tersusunya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah	100%	0	0	0	0	0	0	-	
V	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang terkoordinasikan	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
2	Koordinasi Aksi PPK	terlaksananya koordinasi aksi pencegahan korupsi	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
3	Penyusunan materplan Pendidikan	tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan	100%	0	0	0	0	1	1	100	
4	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	tersusunya startegi dan kebijakan penangulankemiskinan	100%	0	0	0	0	0	0	-	
5	Penyusunan RAD Implementasi ABS-SBK	tersusunya rencana aksi daerah implementasi ABS-SBK	100%	0	0	0	0	0	0	-	
VI	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	terlaksananya koordinasi perencanan bidang prasarana wilayah	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
2	Koordinasi Loan WISM dan Penunjang WISM	terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program WISMP	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	

**RENJA BAPEDALITBANG
TAHUN 2018**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian pada tahun akhir Renstra 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2017 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2017 (tahun berjalan /n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6) * 100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$	12
3	Pemetaan dan Rencana Induk Penataan Kawasan Rawan Bencana	Tersedianya database kawaan rawan bencana	0%	0	0	0	0	0	0	-	
VII	Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah	Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan	100%	40%	50 persen	50 persen	100	60 persen	60%	100	
1	Koordinasi Program PAMSIMAS	terkoordinasikannya program PMSIMAS	100%	40%	50 persen	50 persen	100	60 persen	60%	60	
2	Koordinasi Program AMPL dan PPSP	terkoordinasikannya program AMPL dan PPSP	100%	40%	50 persen	50 persen	100	60 persen	60%	60	
VIII	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	100	5 kerjasama	5 kerjasama	100	
1	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Pihak Ketiga	terkoordinasikannya kerjasama pembangunan dengan pihak ketiga	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	100	5 kerjasama	5 kerjasama	100	
IX	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100	
1	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunya laporan LKPJ kepala daerah	1	1	1	1	100	1	1	100	
2	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	1	1	1	1	100	1	1	100	
3	Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Tersusunya perjanjian Kinerja	1	1	1	1	100	1	1	100	
X	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat integrasi data pembangunan	100%	75%	80%	80%	100	85%	85%	85	
1	Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi updating data sektoral	100%	75%	80%	80%	100	85%	85%	85	
2	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	tersosialisasikannya program-program pembangunan	100%	75%	80%	80%	100	85%	85%	85	
3	Penyediaan Data Statistik Daerah	tersedianya data statistik daerah	100%	1	1	1	100	1	1	100	
4	Penyusunan Profil Daerah	tersusunya profil daerah	100%	1	1	1	100	1	1	100	
XI	Program Perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian pada tahun akhir Renstra 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2017 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2017 (tahun berjalan /n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100\%$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$	12
1	Penyusunan Database Prasarana Wilayah dan SDA Berbasis Informasi Geografis (GIS)	Tersedianya database prasarana wilayah berbasis GIS	1	0	1	1	100	1	1	100	
XII	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
1	Penyusunan Profil Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	tersusunya buku profil pasar	100%	0	1	1	100	1	1	100	
XIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM perencana yang berkompetensi	50	50	50	50	100	50	50	100	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya peningkatan SDM aparatur bappeda	15	10	15	15	100	15	15	100	
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatu perencana lingkup pemda kab pesse	50	50	50	50	100	50	50	100	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator kinerja yang akan diuji pada Badan Perencanaan Daerah yaitu :

1. Informasi Penataan Ruang

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

2. Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang

Terlaksananya penjangkangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.

3. Izin Pemanfaatan Ruang

Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Adapun isu-isu penting di Bapedalitbang dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang koordinasi antar SKPD secara horizontal maupun koordinasi Vertikal, dimana setiap tahun Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan Sinkronisasi Program dan Rapat Kerja dengan pesertanya Dinas / Instansi Terkait di Kabupaten / Kota dan Propinsi .

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Daerah, Penelitina dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan

mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Bapedalitbang, yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan.
Sebagai SKPD yang diberi tugas sebagai perencanaan baik anggaran dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat tergantung dengan ketersediaan tenaga teknis, Dengan jumlah tenaga teknis sangat terbatas dikaitkan dengan rentang tugas-tugas yang sangat banyak dan padat serta mendesak, sehingga optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagai perencana kurang maksimal.
- 2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
Sebagian tugas yang diberikan tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada, oleh sebab itu tugas yang diterima terkadang tidak cepat selesai dengan waktu perencanaan yang telah ditentukan. Dengan keterbatasan jumlah personil maka para personil dituntut untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas agar tercapai perencanaan yang maksimal
- 3) Masih kurangnya kesempatan aparatur dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Peningkatan sumber daya aparatur harus ditingkatkan agar aparatur dapat meningkatkan kapasitas kerja dan sumber daya para aparatur demi pencapaian suatu perencanaan yang telah ditentukan.
- 4) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas data yang dibutuhkan untuk perencanaan.
Kualitas data yang dibutuhkan masih kurang akurat atau kurang bagus dari data yang akan dipergunakan dalam melakukan perencanaan
- 5) Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
Sarana dan prasarana yang tersedia ditempat kerja belum tersedia secara memadai dan masih kurang. Dalam pelaksanaan kerja sarana dan prasarana yang dibutuhkan haruslah lengkap agar perencanaan tercapai dengan maksimal



6) Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan instansi terkait.

Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut koordinasi antar bidang dengan instansi- instansi yang terkait masih kurang. Dengan kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait maka pelaksanaan perencanaan tersebut tidak berjalan memadai.

7) Belum adanya Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal.

Standar operasional dan pelayanan yang disediakan masih minim karena standar operasionalnya belum diterapkan secara optimal.

c. Dampak

Keterbatasan dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Memaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan tupoksi, kekuatan dan kewenangan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Pesisir Selatan.

e. Isu-Isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Bapedalitbang yaitu :

1. Optimalisasi pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.
2. Optimalisasi sistem pendataan/informasi/data
3. Pemantapan peran Bapedalitbang sebagai motivator, koordinator, komunikator serta administrator suatu perencanaan
4. Peningkatan jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.
5. Penyusunan SOP dan SPM
6. Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD





Adapun perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan
Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai tabel berikut:



Tabel. II.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Pesisir Selatan

RANACANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAAN						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
1	2		3			2		3			12
I	Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase dokumen Tata Ruang yang ditindaklanjuti	40%	18.150.000	Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase dokumen Tata Ruang yang ditindaklanjuti	40%	18.150.000	
1	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	terlaksananya evaluasi RTRW	1	0	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	terlaksananya evaluasi RTRW	1	0	
2	Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010 – 2030	Pesisir Selatan	tersusunnya revisi dokumen RTRW	1	0	Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010 – 2030	Pesisir Selatan	tersusunnya revisi dokumen RTRW	1	0	
3	Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Terkoordinasiiknnya pengendalian pemanfaatan ruang	100%	18.150.000	Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Terkoordinasiiknnya pengendalian pemanfaatan ruang	100%	18.150.000	
II	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	6 dokumen	650.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	6 dokumen	650.000.000	
1	Penyusunan Rancangan RKPD	Pesisir Selatan	tersusunnya dokumen RKPD	1	100.000.000	Penyusunan Rancangan RKPD	Pesisir Selatan	tersusunnya dokumen RKPD	1	100.000.000	
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Pesisir Selatan	terlaksananya musrenbang RKPD	1	150.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Pesisir Selatan	terlaksananya musrenbang RKPD	1	150.000.000	
3	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2020	Pesisir Selatan	Tersusunnya RPJMD kab Pessel 2016-2021	1	100.000.000	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2020	Pesisir Selatan	Tersusunnya RPJMD kab Pessel 2016-2021	1	100.000.000	
4	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan	terkelolanya e-planning	1	250.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan	terkelolanya e-planning	1	250.000.000	
5	Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Renstra SKPD	Pesisir Selatan	tersusunnya renstra SKPD	1	50.000.000	Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Renstra SKPD	Pesisir Selatan	tersusunnya renstra SKPD	1	50.000.000	
6	Penyusunan Kajian KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RPJMD	1	-	Penyusunan Kajian KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RPJMD	1	-	
7	Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD	Pesisir Selatan	Tersusunnya Renstra Bappeda 2016-2021	1	-	Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD	Pesisir Selatan	Tersusunnya Renstra Bappeda 2016-2021	1	-	
8	Sosialisasi RPJMD	Pesisir Selatan	tersosialisasikannya RPJMD Kab. Pessel	1	-	Sosialisasi RPJMD	Pesisir Selatan	tersosialisasikannya RPJMD Kab. Pessel	1	-	
9	Penyusunan Kajian KLHS Revisi RTRW	Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RTRW	1	-	Penyusunan Kajian KLHS Revisi RTRW	Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RTRW	1	-	
III	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	4 dokumen	340.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	4 dokumen	340.000.000	
1	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD	Pesisir Selatan	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS RAPBD	2	170.000.000	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD	Pesisir Selatan	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS RAPBD	2	170.000.000	
2	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD	Pesisir Selatan	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	2	170.000.000	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD	Pesisir Selatan	tersusunnya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	2	170.000.000	
IV	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	95%	332.750.000	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	95%	332.750.000	

RANACANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAAN					
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
1	2		3			2		3			12
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	121.000.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	121.000.000	
2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	95%	121.000.000	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	95%	121.000.000	
3	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Pesisir Selatan	terkoordinasikanya rencana percepatan pembangunan kawasan perdesaaan	95%	90.750.000	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Pesisir Selatan	terkoordinasikanya rencana percepatan pembangunan kawasan perdesaaan	95%	90.750.000	
4	Penyusunan Kajian Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Pangan	Pesisir Selatan	tersedianya kajian tentang pengembangan pangan daerah	1	-	Penyusunan Kajian Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Pangan	Pesisir Selatan	tersedianya kajian tentang pengembangan pangan daerah	1	-	
5	Penyusunan Ranperda Pengembangan BUMD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	tersusunya perda BUMD kepariwisataan	1	-	Penyusunan Ranperda Pengembangan BUMD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	tersusunya perda BUMD kepariwisataan	1	-	
6	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	tersusunya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan	1	-	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	tersusunya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan	1	-	
V	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		Persentase perencanaan pembangunan siosial budaya yang terkoordinasikan	95%	442.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		Persentase perencanaan pembangunan siosial budaya yang terkoordinasikan	95%	442.000.000	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	181.500.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	181.500.000	
2	Koordinasi Aksi PPK	Pesisir Selatan	terlaksanananya koordinasi aksi pencegahan korupsi	95%	60.500.000	Koordinasi Aksi PPK	Pesisir Selatan	terlaksanananya koordinasi aksi pencegahan korupsi	95%	60.500.000	
3	Penyusunan materplan Pendidikan	Pesisir Selatan	tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan	1	-	Penyusunan materplan Pendidikan	Pesisir Selatan	tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan	1	-	
4	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	tersusunya startegi dan kebijakan penanqulangankemiskinan	1	200.000.000	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	tersusunya startegi dan kebijakan penanqulangankemiskinan	1	200.000.000	
5	Penyusunan RAD Implementasi ABS-SBK	Pesisir Selatan	tersusunya rencana aksi daerah implementasi ABS-SBK	0	-	Penyusunan RAD Implementasi ABS-SBK	Pesisir Selatan	tersusunya rencana aksi daerah implementasi ABS-SBK	0	-	
VI	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA		Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	95%	431.500.000	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA		Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	95%	431.500.000	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanan bidang prasarana wilayah	95%	181.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanan bidang prasarana wilayah	95%	181.500.000	

RANACANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
1	2		3			2		3			12
2	Koordinasi Loan WISM dan Penunjang WISM	Pesisir Selatan	terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program WISMP	95%	-	Koordinasi Loan WISM dan Penunjang WISM	Pesisir Selatan	terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program WISMP	95%	-	
3	Pemetaan dan Rencana Induk Penataan Kawasan Rawan Bencana	Pesisir Selatan	Tersedianya database kawaan rawan bencana	0	250.000.000	Pemetaan dan Rencana Induk Penataan Kawasan Rawan Bencana	Pesisir Selatan	Tersedianya database kawaan rawan bencana	0	250.000.000	
VII	Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah		Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan	70 persen	255.000.000	Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah		Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan	70 persen	255.000.000	
1	Koordinasi Program PAMSIMAS	Pesisir Selatan	terkoordinasikannya program PMSIMAS	70 persen	180.000.000	Koordinasi Program PAMSIMAS	Pesisir Selatan	terkoordinasikannya program PMSIMAS	70 persen	180.000.000	
2	Koordinasi Program AMPL dan PPSP	Pesisir Selatan	terkoordinasikannya program AMPL dan PPSP	70 persen	75.000.000	Koordinasi Program AMPL dan PPSP	Pesisir Selatan	terkoordinasikannya program AMPL dan PPSP	70 persen	75.000.000	
VIII	Program Kerjasama Pembangunan		Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	85.000.000	Program Kerjasama Pembangunan		Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	85.000.000	
1	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Pihak Ketiga	Pesisir Selatan	terkoordinasikannya kerjasama pembangunan dengan pihak ketiga	5 kerjasama	85.000.000	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Pihak Ketiga	Pesisir Selatan	terkoordinasikannya kerjasama pembangunan dengan pihak ketiga	5 kerjasama	85.000.000	
IX	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	3 dokumen	345.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	3 dokumen	345.000.000	
1	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertangjawaban (LKPJ)	Pesisir Selatan	Tersusunya laporan LKPj kepala daerah	1	110.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertangjawaban (LKPJ)	Pesisir Selatan	Tersusunya laporan LKPj kepala daerah	1	110.000.000	
2	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Pesisir Selatan	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	1	160.000.000	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Pesisir Selatan	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	1	160.000.000	
3	Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Pesisir Selatan	Tersusunya perjanjian Kinerja	1	75.000.000	Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Pesisir Selatan	Tersusunya perjanjian Kinerja	1	75.000.000	
X	Program Pengembangan Data dan Informasi		Tingkat integrasi data pembangunan	90%	340.000.000	Program Pengembangan Data dan Informasi		Tingkat integrasi data pembangunan	90%	340.000.000	
1	Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi updating data sektoral	90%	100.000.000	Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi updating data sektoral	90%	100.000.000	
2	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Pesisir Selatan	tersosialisasikannya program-program pembangunan	90%	50.000.000	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Pesisir Selatan	tersosialisasikannya program-program pembangunan	90%	50.000.000	
3	Penyediaan Data Statistik Daerah	Pesisir Selatan	tersedianya data statistik daerah	1	90.000.000	Penyediaan Data Statistik Daerah	Pesisir Selatan	tersedianya data statistik daerah	1	90.000.000	
4	Penyusunan Profil Daerah	Pesisir Selatan	tersusunya profil daerah	1	100.000.000	Penyusunan Profil Daerah	Pesisir Selatan	tersusunya profil daerah	1	100.000.000	

RANACANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
1	2		3			2		3			12
XI	Program Perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA		Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	95%	-	Program Perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA		Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	95%	-	
1	Penyusunan Database Prasarana Wilayah dan SDA Berbasis Informasi Geografis (GIS)	Pesisir Selatan	Tersedianya database prasarana wilayah berbasis GIS	1	-	Penyusunan Database Prasarana Wilayah dan SDA Berbasis Informasi Geografis (GIS)	Pesisir Selatan	Tersedianya database prasarana wilayah berbasis GIS	1	-	
XII	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	95%	-	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	95%	-	
1	Penyusunan Profil Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	tersusunya buku profil pasar	1	-	Penyusunan Profil Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	tersusunya buku profil pasar	1	-	
XIII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah SDM perencana yang berkompetensi	50	225,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah SDM perencana yang berkompetensi	50	225,000,000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pesisir Selatan	terlaksananya peningkatan SDM aparatur bappeda	15	75,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pesisir Selatan	terlaksananya peningkatan SDM aparatur bappeda	15	75,000,000	
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah	Pesisir Selatan	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatu perencana lingkup pemda kab pesse	50	150,000,000	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah	Pesisir Selatan	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatu perencana lingkup pemda kab pesse	50	150,000,000	

2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat

Tabel. II.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama SKPD: Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung yang menjadi program dan kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam arahan kebijakan pembangunan nasional, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018. Dalam rancangan awal RKPD tersebut arah kebijakan pembangunan difokuskan pada (1) penuntasan capaian RPJMD tahun 2016-2021 yang belum tercapai, (2) Pencapaian sasaran pokok pembangunan berdasarkan RPJPD tahun 2005-2020 pada tahapan ke-3 dan (3) mendukung cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bapedalitbang

A. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dengan menetapkan indikator-indikator keberhasilan dan hambatan yang dijadikan sebagai pengukur kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya. Adapun tujuan dari Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan.
2. Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai program dan mejamin keberlanjutan usaha perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumen-dokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.

4. Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka menginventarisasi permasalahan untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.

B. Sasaran

Sasaran atau objektives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sasaran yang ingin dicapai Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.
4. Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (*bottom up*) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif
6. Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang masih berpedoman pada Renstra Bapedalitbang 2016-2021, selain itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada kegiatan tahun yang sudah berlalu dan sasaran RPJPD tahapan ke-3. Dalam tabel program dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta rencana tahun depan dan Prakiraan Maju Rencana. Untuk selengkapnya rincian program dan kegiatan Bapedalitbang tahun 2018 serta Prakiraan Maju Rencana tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel III.1 dibawah ini.

Tabel III-1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		KET
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN				766,883,975			843,572,373	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	42,900,000			47,190,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	85,470,000			94,017,000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	103,100,514			113,410,565	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	21,450,000			23,595,000	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	48,015,000			52,816,500	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	39,825,720			43,808,292	
7	Peny. Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	35,736,371			39,310,008	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	20,132,970			22,146,267	
9	Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	7,590,000			8,349,000	
10	Peny. Makanan dan Minuman	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	65,795,400			72,374,940	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terkoordinasikannya kegiatan pembangunan lintas sektor	Kab. Pessel	100%	211,398,000			232,537,800	
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	21,450,000			23,595,000	
13	Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	Terkoordinasikannya kegiatan pembangunan lintas sektor	Kab. Pessel	100%	64,020,000			70,422,000	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				780,212,000			843,233,200	
1	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	Kab. Pessel	100%	19,525,000			21,477,500	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	214,500,000			235,950,000	
3	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	Kab. Pessel	100%	116,611,000			128,272,100	
4	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	Kab. Pessel	100%	197,076,000			216,783,600	
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	150,000,000			150,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		KET
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Pessel	100%	82.500.000			90.750.000	
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				77.000.000			84.700.000	
	1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Pessel	100%	77.000.000			84.700.000	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				55.000.000			60.500.000	
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Pessel	100%	55.000.000			60.500.000	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFOMASI				319.000.000			350.900.000	
	1	Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pessel	100%	104.500.000			114.950.000	
	2	Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Tahun 2015	Kab. Pessel	100%	66.000.000			72.600.000	
	3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Kab. Pessel	100%	49.500.000			54.450.000	
	4	Penyediaan Data Statistik Daerah	Kab. Pessel	100%	38.500.000			42.350.000	
	5	Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pessel	100%	60.500.000			66.550.000	
VI	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN				55.000.000			60.500.000	
	1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah	Kab. Pessel	100%	55.000.000			60.500.000	
VII	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR				302.500.000			332.750.000	
	1	Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) 2	Kab. Pessel	100%	82.500.000			90.750.000	
	2	Replikasi Pengelolaan data AMPL	Kab. Pessel	100%	220.000.000			242.000.000	
					-			-	
VIII	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.848.000.000			2.032.800.000	
	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kab. Pessel	100%	198.000.000			217.800.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		KET
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Penyusunan Rancangan RPKD	Kab. Pessel	100%	93.500.000			102.850.000	
	3	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016	Kab. Pessel	100%	148.500.000			163.350.000	
	4	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan Tahun 2015	Kab. Pessel	100%	137.500.000			151.250.000	
	5	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kab. Pessel	100%	71.500.000			78.650.000	
	7	Koordinasi Penyusunan TAPKIN	Kab. Pessel	100%	55.000.000			60.500.000	
	8	Penyusunan Perda RPJMD Kab.Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	Kab. Pessel	100%	220.000.000			242.000.000	
	9	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Pessel	100%	275.000.000			302.500.000	
	10	Koordinasi Pembinaan Pembangunan Pasca Daerah Tertinggal	Kab. Pessel	100%	66.000.000			72.600.000	
	11	Kajian KLHS RPJMD Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pessel	100%	275.000.000			302.500.000	
	12	Monitoring , Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana pembangunan	Kab. Pessel	100%	88.000.000			96.800.000	
	13	Penilaian SKPD dan Nagari Penyusun Perencanaan Berprestasi	Kab. Pessel	100%	220.000.000			242.000.000	
IX	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA				231.000.000			254.100.000	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Kab. Pessel	100%	110.000.000			121.000.000	
		Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)	Kab. Pessel	100%	27.500.000			30.250.000	
		Koordinasi Kabupaten Sehat	Kab. Pessel	100%	33.000.000			36.300.000	



RENJA BAPEDALITBANG
TAHUN 2018

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana T	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Da indikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					#REF!			#REF!
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN				766.883,975			
	PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN							
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	42.900,000			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	85.470,000			
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	103.100,514			
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	21.450,000			
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	48.015,000			
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	39.825,720			
7	Peny. Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	35.736,371			
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	20.132,970			
9	Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	7.590,000			
10	Peny. Makanan dan Minuman	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	65.795,400			
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terkoordinasikannya kegiatan pembangunan lintas sektor	Kab. Pessel	100%	211.398,000			
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	21.450,000			
13	Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	Terkoordinasikannya kegiatan pembangunan lintas sektor	Kab. Pessel	100%	64.020,000			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				780.212,000			
1	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	Kab. Pessel	100%	19.525,000			
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	214.500,000			
3	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	Kab. Pessel	100%	116.611,000			
4	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Aset pemerintah daerah	Kab. Pessel	100%	197.076,000			
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	150.000,000			
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	Kab. Pessel	100%	82.500,000			
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				77.000,000			
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya Aparatur yang disiplin	Kab. Pessel	100%	77.000,000			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				55.000,000			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Aparatur Bappeda yang berkualitas	Kab. Pessel	100%	55.000,000			
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFROMASI				319.000,000			
1	Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya data dan informasi bagi pengambilan kebijakan daerah	Kab. Pessel	100%	104.500,000			
2	Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Tahun 2018	Tersedianya data dan informasi bagi pengambilan kebijakan daerah	Kab. Pessel	100%	66.000,000			
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Tersebaranya informasi pelaksanaan pembangunan	Kab. Pessel	100%	49.500,000			
4	Penyediaan Data Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi bagi pengambilan kebijakan daerah	Kab. Pessel	100%	38.500,000			
5	Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya data dan informasi bagi pengambilan kebijakan daerah	Kab. Pessel	100%	60.500,000			
	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN				55.000,000			
1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah	Terkoordinasikannya kebijakan pembangunan dengan daerah tetangga	Kab. Pessel	100%	55.000,000			
	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR				302.500,000			
1	Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (FAMSIVAS) 2	Terkoordinasikannya pelaksanaan program Pamsimas	Kab. Pessel	100%	82.500,000			
2	Replikasi Pengelolaan data AMPL	Tersedianya data AMPL yang akurat	Kab. Pessel	100%	220.000,000			
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.848.000,000			
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terwujudnya proses perencanaan yang partisipatif	Kab. Pessel	100%	198.000,000			
2	Penyusunan Rancangan RKPD	Terusunnya dokumen perencanaan daerah	Kab. Pessel	100%	93.500,000			
3	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2018	Terusunnya dokumen perencanaan daerah	Kab. Pessel	100%	148.500,000			
4	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan Tahun 2018	Terusunnya dokumen perencanaan daerah	Kab. Pessel	100%	137.500,000			
5	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKJP)	Terusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Kab. Pessel	100%	71.500,000			
7	Koordinasi Penyusunan TAPKIN	Terusunnya kontrak kinerja / SKCT SKPD	Kab. Pessel	100%	55.000,000			
8	Penyusunan Perda RPJMD Kab.Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	Terusunnya dokumen perencanaan daerah	Kab. Pessel	100%	220.000,000			
9	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terkelolanya perencanaan pembangunan daerah secara lebih komprehensif	Kab. Pessel	100%	275.000,000			
10	Koordinasi Pembinaan Pembangunan Pasca Daerah Tertinggal	Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan pedesaan dalam mentantasakan daerah tertinggal	Kab. Pessel	100%	66.000,000			
11	Kajian KLHS RPJMD Kab. Pesisir Selatan	Terusunnya dokumen perencanaan daerah	Kab. Pessel	100%	275.000,000			
12	Monitoring , Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana pembangunan	Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Kab. Pessel	100%	88.000,000			
13	Penilaian SKPD dan Nagan Penyusun Perencanaan Berprestasi	Terwujudnya proses perencanaan pembangunan yang baik dan taat asas	Kab. Pessel	100%	220.000,000			
	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA				231.000,000			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan tingkat bidang sosial budaya	Kab. Pessel	100%	110.000,000			
	Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)	Terkoordinasikannya pelaksanaan program keluarga harapan	Kab. Pessel	100%	27.500,000			
	Koordinasi Kabupaten Sehat	Terkoordinasikannya pelaksanaan program kabupaten Sehat	Kab. Pessel	100%	33.000,000			
	Koordinasi Aksi PPK	Terkoordinasikannya program pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kab. Pessel	100%	60.500,000			
	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH dan SDA				462.000,000			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Terkoordinasikannya	Kab. Pessel	100%	93.500,000			





**BAB IV
PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan yang berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahapan ke-3, hasil evaluasi capaian Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan diselaraskan dengan prioritas dan arah kebijakan RPJMN tahun 2015-2019. Rencana Kerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegritas dan sinergis serta berkelanjutan dengan OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.


Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang terukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapedalitbang Tahun 2016-2021. Selain itu Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Agar diperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan haruslah melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan (stakeholder) melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah lingkup Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga program dan kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

dibawah lingkup Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga program dan kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Guna mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas perencanaan maka perlu dilakukan peningkatan terhadap kapasitas Sumber Daya Aparatur perencanaan dalam melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Painan, Februari 2017
Kepala Bapedalitbang,


Yozki wandri, S.Pi, M.Si

NIP. 19750101 200003 1 003

